



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

KEBIJAKAN TRANSPORTASI PERKOTAAN



DIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

MAKASSAR, 26 – 28 NOPEMBER 2007

TRANSPORTASI PERKOTAAN

- ISU UTAMA
- PP 38/2007
- ARAH KEBIJAKAN
- KEBIJAKAN, STRATEGI & PROGRAM
- PELAKSANAAN KEGIATAN
- RENCANA KEGIATAN
- KESIMPULAN/HAL-HAL YANG PERLU DIDISKUSIKAN



Sekian
dan
Terima Kasih
"Selamat Bertugas"

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
(www.hubdat.web.id)

ISU UTAMA TRANSPORTASI PERKOTAAN

- ❖ Belum tersedianya database transportasi perkotaan utk dapat mengetahui karakteristik/kinerja & penyusunan perencanaannya
- ❖ Belum tersedianya Master Plan/Grand Design penyelenggaraan transportasi perkotaan yang sudah disahkan ([UU Tata Ruang](#));
- ❖ Lalu lintas : Pertumbuhan kendaraan khususnya sepeda motor; Pengurangan kapasitas jalan → PK5, Parkir, Pasar tumpah; Pergerakan angk. barang
- ❖ Pelayanan angkutan umum : Pelayanan terus menurun
- ❖ Lingkungan : Pemborosan energi dan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor; Andalalin



PP 38 TAHUN 2007

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

- Perhubungan merupakan salah satu **urusan yang wajib diselenggarakan** oleh Pemda Provinsi & Pemda Kab./Kota, berkaitan dgn pelayanan dasar (Pasal 7)
- Penyelenggaraan urusan wajib oleh Pemda Provinsi & Pemda Kab./Kota berpedoman pd **SPM** yg ditetapkan Pemerintah & dilaksanakan secara bertahap (Pasal 8)
- Pemda Provinsi & Pemda Kab./Kota dlm melaksanakan urusan pemerintahan wajib berpedoman pada **norma, standar, prosedur dan kriteria** yg ditetapkan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (Pasal 11)
- Pemerintah wajib melakukan **pembinaan** kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung kemampuan Pemerintah Daerah dlm menyelenggarakan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangannya (Pasal 18)
- Sertifikasi Kompetensi Penilai Andalalin (Lampiran PP 38/2007 : Pembagian Urusan Pemerintahan Bid. Perhubungan)



Arah Kebijakan Transportasi Perkotaan

- Pengembangan Transportasi Perkotaan yg didasarkan kepada **Master Plan** Pengembangan Transportasi Perkotaan.
- Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan pd penyesuaian bentuk angkutan → penyusutan paratransit → angkutan massal, dengan **pelayanan sesuai SPM**.
- Pengembangan transportasi perkotaan kepada bentuk **Jaringan dan wilayah Aglomerasi** (Jabodetabek, Bandung Raya, Joglosemar, Kartomantul, Gerbang Kertosusila, Malang Raya, Gelangban, Sarbagita, Maminasata, Kapet Pare-Pare/Ajitaparang, Mebidang, Palapa ,dll).
- Mendorong pengembangan pembangunan **angk. tidak bermotor, pejalan kaki dan sepeda**



- Pengembangan konsep pembatasan penggunaan kendaraan → **Traffic Demand Management (TDM)**
- Pemanfaatan teknologi modern untuk penataan lalu lintas untuk kota raya dan besar → **Intelligent Transport System (ITS)**
- Pengembangan **transportasi pemadu moda** untuk menjalin keterhubungan pusat kota dgn outlet seperti bandar udara dan pelabuhan laut serta pembenahan fasilitas intermoda
- Pengembangan transportasi perkotaan yg **ramah lingkungan** → konservasi dan diversifikasi energi

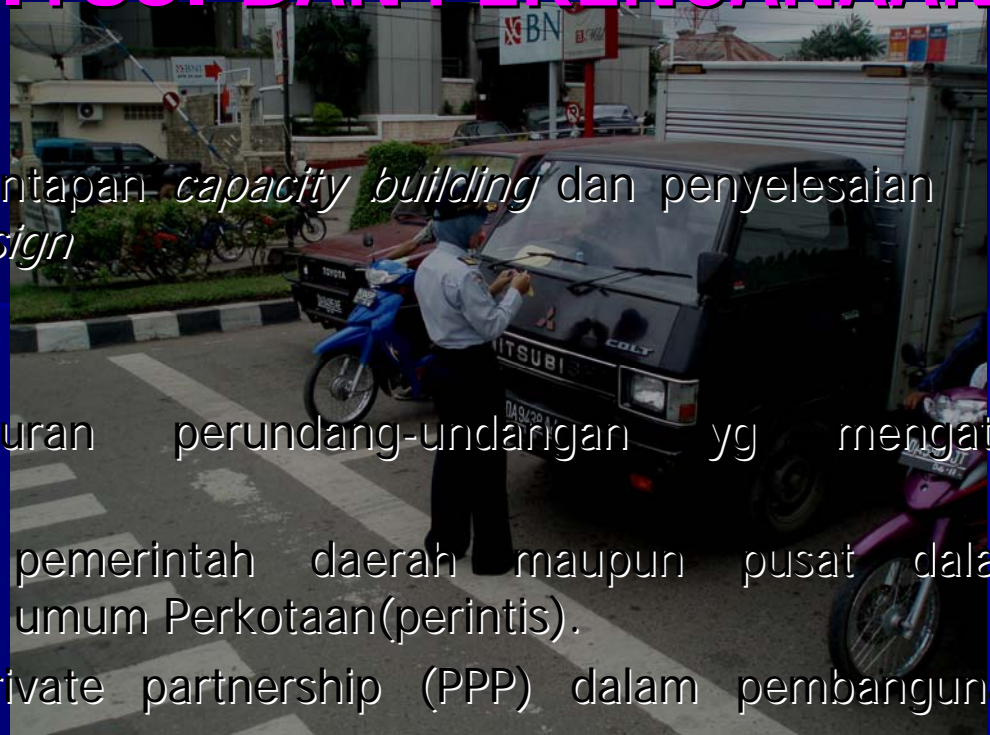
KEBIJAKAN, STRATEGI & PROGRAM

- ❖ REGULASI , INSTITUSI DAN PERENCANAAN ;
- ❖ PRASARANA ;
- ❖ LALU LINTAS ;
- ❖ ANGKUTAN UMUM ;
- ❖ LINGKUNGAN .

1. REGULASI , INSTITUSI DAN PERENCANAAN

Kebijakan

Pembenahan Regulasi , Pemantapan *capacity building* dan penyelesaian / *Set Up Master Plan/Grand Design*



Strategi

- ❑ Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yg mengatur Transportasi Perkotaan;
- ❑ Memberdayakan peran pemerintah daerah maupun pusat dalam memprioritaskan angkutan umum Perkotaan(perintis).
- ❑ Pengembangan Public Private partnership (PPP) dalam pembangunan transportasi perkotaan
- ❑ **Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus**

Program

- Revisi Peraturan Perundang-undangan: UU 14/92 dan Peraturan pelaksanaan ,Penyusunan Norma dan Standar lainnya.
- Penyusunan Roadmap/Master Plan Transportasi Perkotaan
- Kegiatan konsolidasi transportasi perkotaan → Master Plan Kota.
- Pembentukan **Urban Transport Information Centre (UTIC)**

2. PRASARANA

Kebijakan

Pembangunan prasarana transportasi dengan Pengembangan konsep integrasi tata guna lahan dan transportasi .

Strategi

- ❑ Pengembangan konsep Transport Oriented Development (TOD) dengan memadukan perencanaan transportasi dengan tata guna lahan (UU Tata Ruang)
- ❑ Pengembangan fasilitas pejalan kaki dan Pesepeda

Program

Pengembangan kota-kota percontohan transportasi perkotaan (Kota Raya, Besar, Sedang dan Kecil, Kawasan Timur dan Barat);

3. LALU LINTAS

Kebijakan

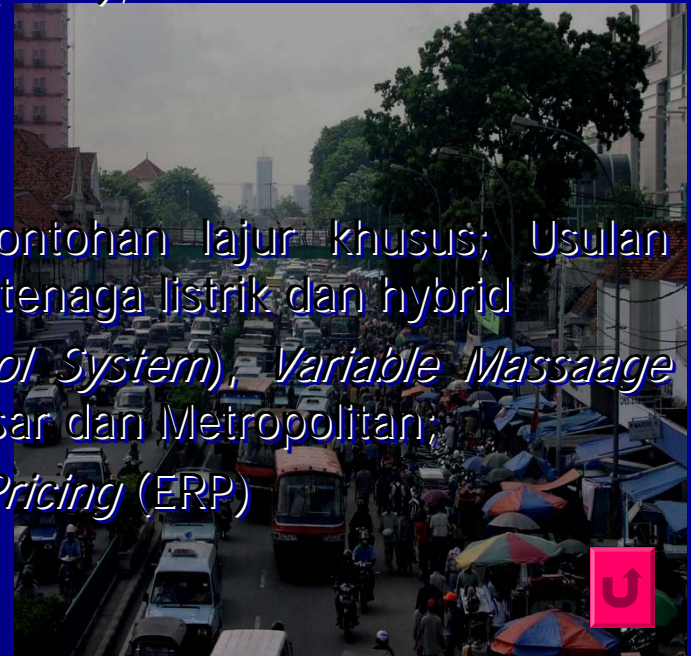
Peningkatan kelancaran lalu lintas.

Strategi

- ❑ Penataan penggunaan Sepeda motor;
- ❑ Pengembangan Intelligent Transport System;
- ❑ Penerapan Traffic Demand Management (TDM);

Program

- Kajian penataan sepeda motor → Percontohan lajur khusus; Usulan produksi sepeda motor ber cc kecil dan bertenaga listrik dan hybrid
- Pengembangan *ATCS (Area Traffic Control System)*, *Variable Message sign (VMS)*, *System Navigasi* pada Kota Besar dan Metropolitan;
- Pembatasan lalu lintas → *Electronic Road Pricing (ERP)*



4. ANGKUTAN UMUM

Kebijakan

Keberpihakan pada penggunaan dan pengembangan angkutan umum.

Strategi

- ❑ Mengembangkan angkutan umum yg mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yg handal dan berkelanjutan.
- ❑ Menjamin kepastian dan keberlangsungan pelayanan angkutan umum dengan penetapan **Standar Pelayanan Minimal**.

Program

- Pengembangan angkutan massal *BRT (Bus Rapid Transit/ busway)* pada Kota Besar dan Metropolitan;
- Pengembangan angkutan bus sedang untuk Kota Sedang melalui DAMRI
- Pengembangan angkutan pelajar/perintis;
- Integrasi angkutan perkotaan;
- Pengembangan sistem pembayaran yg lebih akuntabel dan terintegrasi (*Smart Card*)
- Penerapan sistem tender untuk perizinan.

5. LINGKUNGAN

Kebijakan

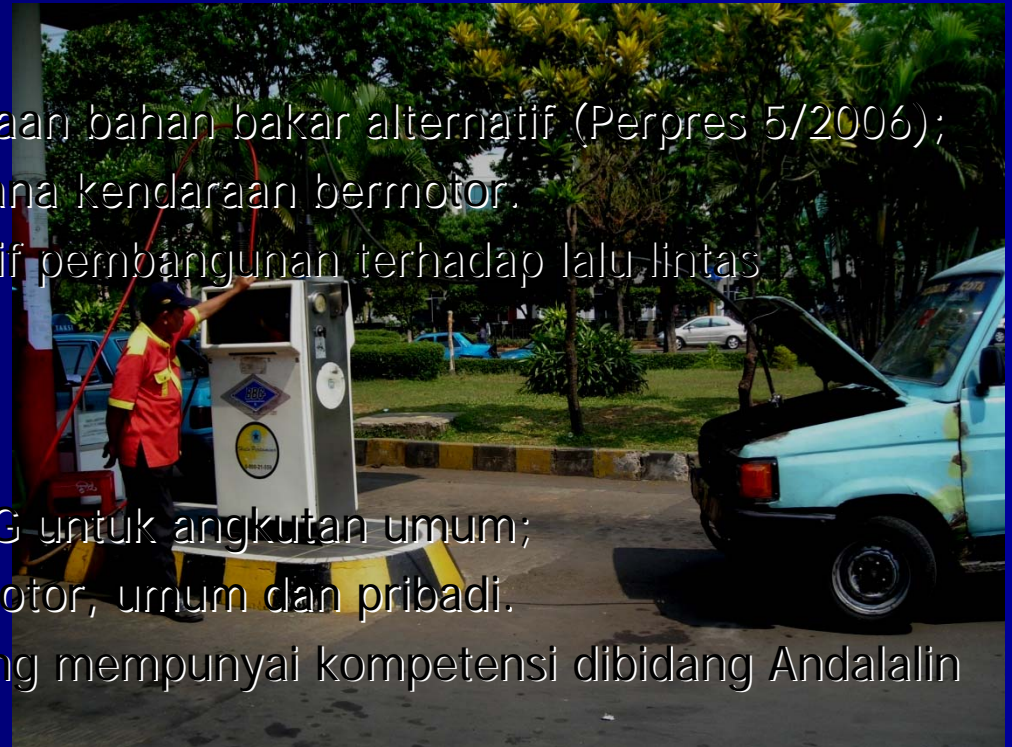
Penghematan energi dan Mengurangi dampak negatif transportasi.

Strategi

- ❑ Mendayagunakan penggunaan bahan bakar alternatif (Perpres 5/2006);
- ❑ Meningkatkan kelaikan sarana kendaraan bermotor.
- ❑ Pencegahan dampak negatif pembangunan terhadap lalu lintas

Program

- Sosialisasi Penggunaan BBG untuk angkutan umum;
- Pengujian kendaraan bermotor, umum dan pribadi.
- Mempersiapkan tenaga yang mempunyai kompetensi dibidang Andalalin



PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT BSTP TAHUN 2007

1. REGULASI DAN INSTITUSI

- a. Konsolidasi penanganan permasalahan lalu lintas dan angkutan dibeberapa kota
- b. Penyusunan data base transportasi perkotaan
- c. Penyusunan Pedoman Teknis (Pola Distribusi Barang & Analisis Dampak Transportasi)
- d. Pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan perkotaan (WTN)

2. PRASARANA

- a. Standarisasi Fasilitas Perpindahan dan Fasilitas Pendukung Angkutan Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan
- b. Penyusunan Pola Pengembangan jaringan Transportasi untuk Wilayah Aglomerasi (Jabodetabek, SSG, Mebidang, Sarbagita dan Kedungsepur)



3. LALU LINTAS & LINGKUNGAN

- a. Pembangunan ATCS di Tegal (Pantura) & APILL Tenaga Surya di Wilayah Perkotaan (Kupang, Balikpapan dan Surakarta)**
- b. Pengadaan dan Pemasangan Konverter Kit taxi di DKI**
- c. Evaluasi dampak lalu lintas di pusat-pusat kegiatan dan Penyuluhan dampak transportasi**
- d. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Angkutan Umum Berbahan Bakar Alternatif**

4. ANGKUTAN UMUM

- a. Pelaksanaan evaluasi kinerja angkutan umum di beberapa kota
- b. Perencanaan dan Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (*Bus Rapid Transit*) : Bandung (belum selesai), Bogor, Yogyakarta
- c. Perencanaan Teknis Pengguna Angkutan Umum Pemadu Moda (*Port Shuttle Services*) dari/ke Simpul Transportasi
- d. Peningkatan pelayanan angkutan umum di beberapa kota melalui pembangunan bus Perum Damri
- e. Peningkatan pelayanan angkutan umum bagi pelajar melalui pembangunan bus sekolah di beberapa kota
- f. Kegiatan survai pemantauan pelayanan angkutan pada saat arus mudik dan balik Lebaran 2007

RENCANA KEGIATAN DIREKTORAT BSTP TAHUN 2008

1. REGULASI DAN INSTITUSI

- a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan
- b. Penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
- c. Penyusunan peraturan dalam rangka revisi RUU LLAJ
- d. Penyusunan peraturan pelaksanaan Permenhub KM 14/2006
- e. Penyelesaian Master plan/Grand Design transportasi Perkotaan Jabodetabek/ITDP
- f. Bantuan teknis penyusunan Master Plan/Grand Design Transportasi perkotaan di beberapa kota Aglomerasi
- g. Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kota Besar, Sedang dan Kecil
- h. Penyelesaian Pembangunan dan Sosialisasi Urban Transport Information Center (UTIC).
- i. Sosialisasi dan publikasi pengembangan transportasi perkotaan kepada masyarakat melalui media
- j. Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan Lomba tertib Lalu Lintas dan angkutan Kota / WTN



2. PRASARANA

- a. Studi Kelayakan pradesain dan detail desain BRT di beberapa kota
- b. Bantuan Pengadaan prasarana BRT (Surabaya, Makassar, Semarang, Pekanbaru dan Surakarta)
- c. Penyediaan fasilitas lalu lintas (rambu, marka APILL) di Jalan nasional pada kawasan perkotaan

3. LALU LINTAS & LINGKUNGAN

- a. Pilot project Jalur sepeda dan pejalan kaki
- b. Pembangunan ATCS Pantura
- c. Penyusunan perencanaan ITS dan Smart Card Jabodetabek
- d. Penanganan titik-titik kemacetan di jalan nasional pada kawasan perkotaan (a.l. Pemasangan pagar pemisah, Separator)
- e. Pembangunan Kota Percontohan
- f. Evaluasi dampak lalu lintas di pusat-pusat kegiatan dan Penyuluhan dampak transportasi

4. ANGKUTAN UMUM

- a. Bantuan Pengadaan sarana BRT (Surabaya, Makassar, Semarang, Pekanbaru dan Surakarta)
- b. Peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan untuk Kota Sedang melalui DAMRI
- c. Peningkatan pelayanan angkutan umum khusus pelajar/bus sekolah
- d. Perwujudan Angkutan Pemadu Moda Bandara di Kota – Kota Propinsi
- e. Kegiatan survai pemantauan pelayanan angkutan pada saat arus mudik dan balik Lebaran 2008

BEBERAPA HAL PENTING YANG PERLU DIDISKUSIKAN :

1. Bentuk Master Plan/Grand Design Transportasi perkotaan :
 - Turunan dari Tatrampil/luk ?
 - Framework/Outline
 - Pengesahan oleh ?
2. Apa yang harus dilakukan terhadap pembenahan sepeda motor (sbg alat angkut dgn tingkat kecelakaan tertinggi)
3. Apa yang harus dilakukan terhadap PKL, On street parkir dan Pasar tumpah?



Lanjutan''

3. Pemanfaatan teknologi modern manajemen lalin (ITS dan TDM) untuk kota besar/aglomerasi
4. Strategi penggantian bentuk angkutan (metoda peremajaan, operator,dll)
BRT →kota raya dan besar
Bis sedang→Kota sedang (DAMRI)
4. Kesepakatan peran daerah dalam pemberian prioritas terhadap angkutan umum perkotaan (subsidi)
6. Bagaimana penerapan andalalin agar menjadi persyaratan IMB (PP 38/2007 kompetensi Petugas Andalalin)

Pasal 61 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Ketentuan Pidana (Pasal 69 s/d Pasal 72) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

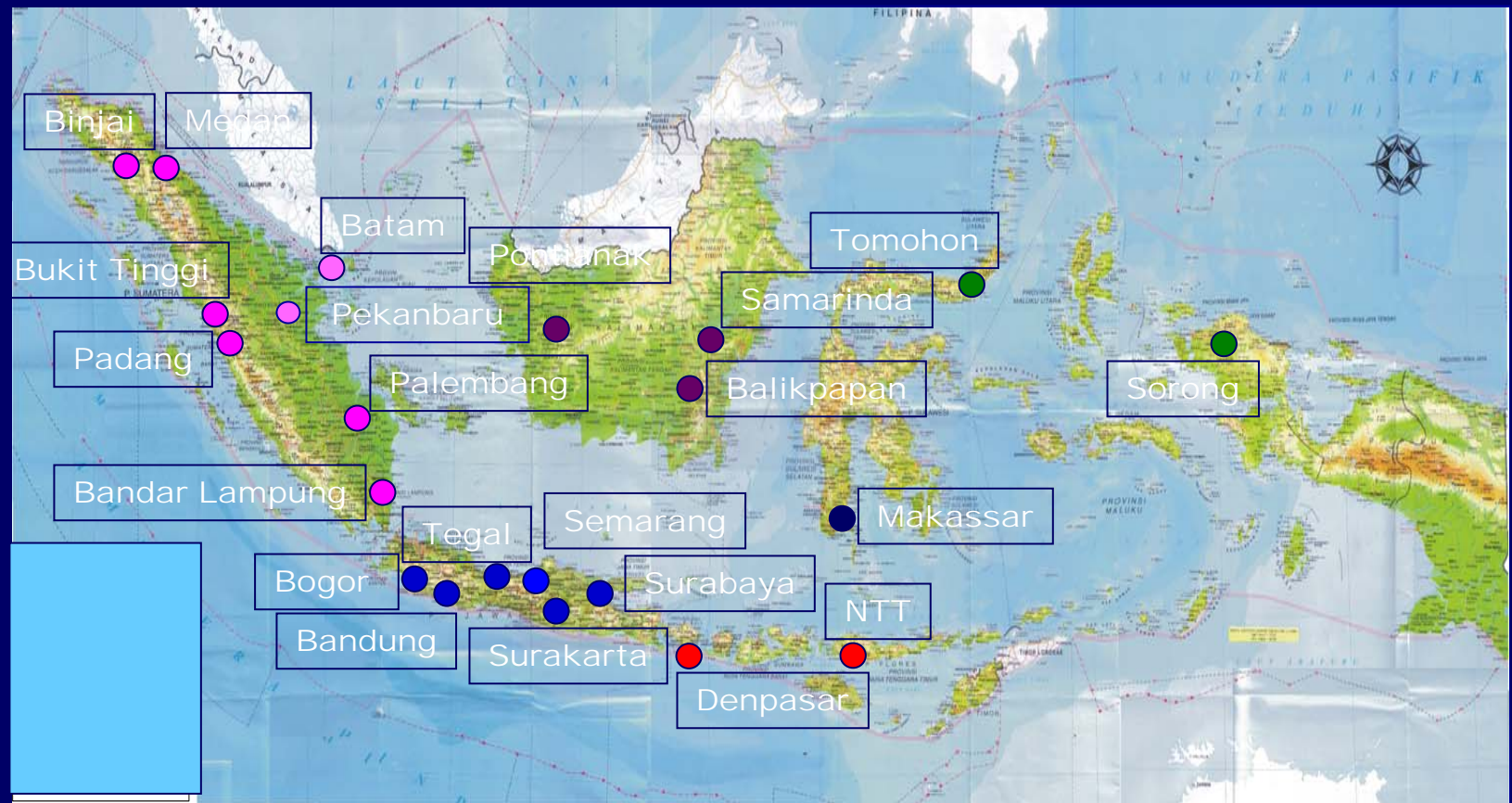
1. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)(Pasal 69 huruf a)
2. Setiap orang yang **memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang** (Pasal 70 huruf a & b) :
 - a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. **mengakibatkan perubahan fungsi ruang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 71)
4. Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 72)

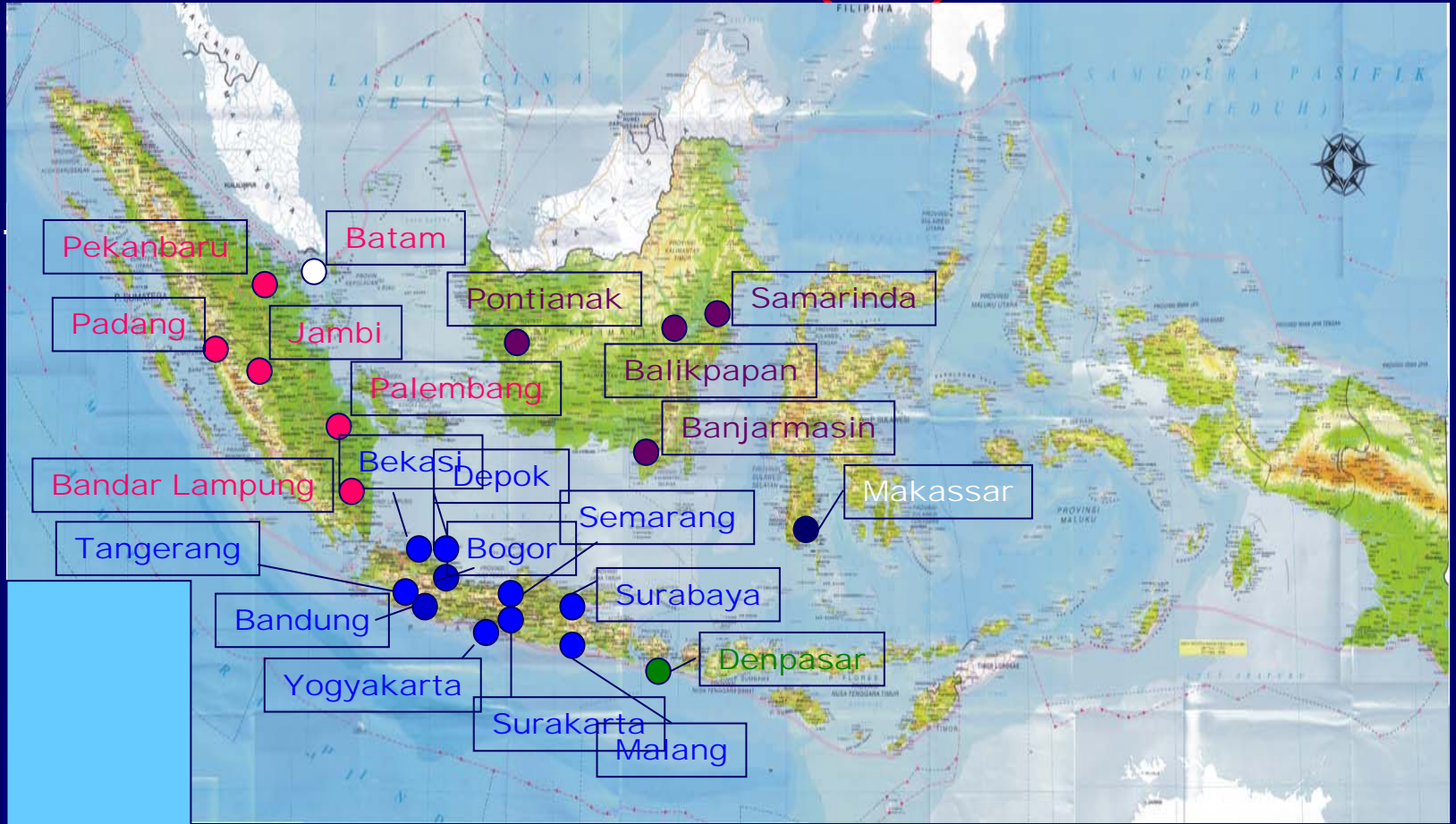
POTENSI PENGEMBANGAN ANGKUTAN BUS KOTA DI KOTA SEDANG MELALUI PERUM DAMRI

1. JAMBI
2. BENGKULU
3. CIREBON
4. KENDARI
5. PALU
6. AMBON
7. MANADO
8. KUPANG
9. SORONG
10. MANOKWARI
11. PANGKALPINANG
12. GORONTALO

RENCANA PROGRAM BANTUAN TEKNIS KAWASAN/KOTA PERCONTOHAN

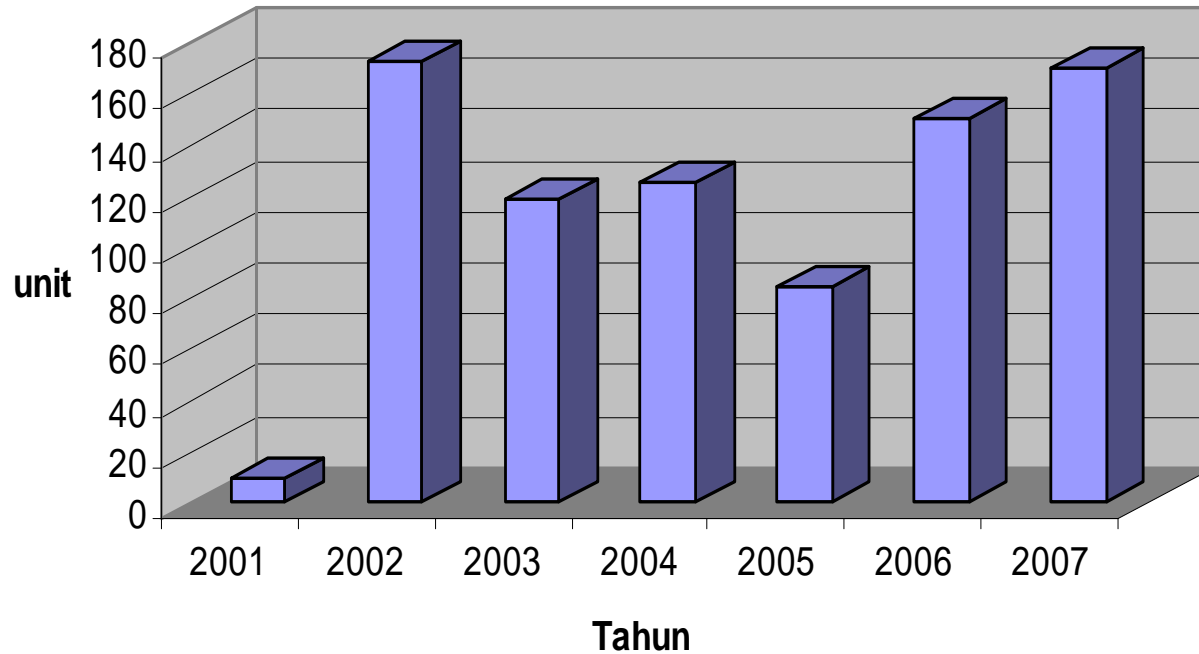


RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) S/D 2014



No.	Tahun	Pengembangan angkutan Umum Massal
1	2007	Bogor, Bandung, Yogyakarta
2	2008	Surabaya, Surakarta, Pekanbaru, Makassar, Semarang
3	2009	Malang, Pontianak, Denpasar, Depok, Tangerang, Bekasi, Palembang, Padang, Samarinda, Banjarmasin, Balikpapan
4	2011	Bandar Lampung
5	2012	Jambi

Bantuan Sarana Bus untuk Angkutan Pelajar/Mahasiswa dan Angkutan Kota Perintis



Year	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Volume (unit)	10	173	119	125	85	150	170

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BSTP



**ROAD MAP JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014**

No	Nama Kegiatan	Jadwal Penyusunan						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penyusunan Pedoman Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kawasan Perkotaan Aglomerasi;							
2.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Bandung Metropolitan Area;							
3.	Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Maminasata;							
4.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Padang - Lubuk Ahung - Pariaman;							
5.	Penyusunan Kebijakan Transportasi Perkotaan Berdasarkan Kategori Kota Raya, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil;							
6.	Penyusunan Grand Design Pengembangan Transportasi Perkotaan;							
7.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan (Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang dan Kota Depok);							
8.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Pekanbaru - Bangkinang, Prop. Riau;							
9.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Pontianak - Mempawah;							
10.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Palembang - Prabumulih - Muara Enim;							
11.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Malang Raya;							
12.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Aji Teparang (Kapet, Pare-Pare);							
13.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan Di Kawasan Perkotaan Aglomerasi Bandung Metropolitan Area;							
14.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan Di Kawasan Perkotaan Maminasata;							
15.	Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kota Bandung, Cimahi, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis;							
16.	Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kota Semarang, Kendal, Pati, Demak, Ungaran, Kudus, Salatiga dan Surakarta;							
17.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Surakarta - Karanganyar;							
18.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan di							

**ROAD MAP JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014**

No	Nama Kegiatan	Jadwal Penyusunan						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Balikpapan;							
19.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Bandar Lampung - Metro - Kalianda;							
20.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Bukittinggi - Batusangkar - Payakumbuh;							
21.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kota Pekanbaru dan Kota Palembang;							
22.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Aglomerasi Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kota Kepanjen);							
23.	Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Tarakan.							
24.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Manado - Minahasa - Tomohon;							
25.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Samarinda - Bontang;							
26.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Cilegon - Serang - Rangkasbitung - Pandeglang;							
27.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Ambon - Masohi - Namlea;							
28.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Aglomerasi Maminasata dan Malang Raya;							
29.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kota Padang dan Kota Pontianak;							
30.	Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kota Manado, Kota Minahasa, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kota Gorontalo.							
31.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kota Jambi;							
32.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Muara Jambi;							
33.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Batang Hari;							
34.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Banjarnasin - Banjarbaru - Martapura;							
35.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Palangkaraya - Sampit - Pangkalan Bun;							
36.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Aglomerasi Bandar Lampung - Metro - Kalianda;							

**ROAD MAP JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014**

No	Nama Kegiatan	Jadwal Penyusunan						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
37.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Aglomerasi Manado - Minahasa - Tomohon;							
38.	Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kota Martapura, Kota Pelahari, Kota Tanjung dan Kota Amuntai, Prop. Kalimantan Selatan;							
39.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Kupang - Soe;							
40.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Mataram - Praya - Selong;							
41.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Palu - Donggala;							
42.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Bandar Lampung - Kalianda - Metro;							
43.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kawasan di Kota Jambi dan Kota Bengkulu;							
44.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Aglomerasi Banjarmasin - Banjarbaru - Martapura;							
45.	Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kupang dan Mataram;							
46.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Kota Kendari - Konawe - Kolaka;							
47.	Penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi Gorontalo - Limboto;							
48.	Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Jambi dan Kota Bengkulu;							
49.	Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi Perkotaan di Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Ngawi dan Kota Lumajang.							

**ROAD MAP JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014**

No	Nama Kegiatan	Jadwal Penyusunan						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pembangunan Urban Transport Information Center (UTIC).							
2.	Penyusunan Profil Transportasi Perkotaan (Tahap IV dan Aplikasi).							
3.	Penyusunan Profil Transportasi Perkotaan (Tahap V dan Aplikasi)							
4.	Penyusunan Profil Transportasi Perkotaan (Tahap VI dan Aplikasi)							
5.	Penyusunan Profil Transportasi Perkotaan (Tahap VII dan Aplikasi)							
6.	Penyusunan Profil Transportasi Perkotaan (Tahap VIII dan Aplikasi)							
7.	Penyusunan Profil Transportasi Perkotaan (Tahap IX dan Aplikasi)							
8.	Penyusunan Profil Transportasi Perkotaan (Tahap X dan Aplikasi)							

ROAD MAP ANGKUTAN PERKOTAAN TAHUN 2008 - 2014

(dalam Jutaan Rp.)

NO	KEGIATAN	JUMLAH	UNIT	HARGA SATUAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	JUMLAH DANA
1	Study Kelayakan, Pradesain & Detail desain BRT											
a.	Study Kelayakan & Pradesain	14	Paket	500.0	3	3	4	4				7,000.0
b.	Detail Desain	17	Paket	800.0	3	3	3	4	4			13,600.0
2	Pengadaan sarana dan prasarana BRT											
a.	Sarana Bus Sedang AC	600	bus	400.0	100	100	100	100	100	100	0	240,000.0
b.	Sarana Bus Besar AC	250	bus	900.0	50	50	50	50	50	0	0	225,000.0
c.	Prasarana BRT	20	Paket	10,000.0	3	3	4	4	4	2	0	200,000.0
3	Pengadaan Sarana Angkutan Perkotaan											
a.	Sarana Angkutan Perkotaan DAMRI											
i.	Bus Besar	350	bus	700.0	50	50	50	50	50	50	50	245,000.0
ii.	Bus Sedang	700	bus	300.0	100	100	100	100	100	100	100	210,000.0
b.	Sarana Angkutan Perintis Perkotaan	700	bus	300.0	100	100	100	100	100	100	100	210,000.0
c.	Sarana Angkutan Pelajar/Mahasiswa	700	bus	300.0	100	100	100	100	100	100	100	210,000.0
4	Pengadaan Halte/ Bus Stop											
a.	Halte	600	Buah	40.0		100	100	100	100	100	100	24,000.0
b.	Bus Stop	6,000	Buah	0.6		1000	1000	1000	1000	1000	1000	3,600.0
5	Subsidi Angkutan Perkotaan											
a.	DAMRI	7	Paket	50,000.0	1	1	1	1	1	1	1	350,000.0
b.	Pemda	6	Paket	20,000.0		1	1	1	1	1	1	120,000.0
6	Penyusunan Pedoman Teknis	7	Paket	1,000.0	1	1	1	1	1	1	1	7,000.0
7	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Perkotaan	7	Paket	1,000.0	1	1	1	1	1	1	1	7,000.0
	TOTAL											2,072,200.0

ROAD MAP ANGKUTAN PERKOTAAN TAHUN 2008 - 2014

NO	NAMA KOTA	KEGIATAN	TAHUN											
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
9	MAKASSAR	1 MOU				■								
		2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan												
		3 Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)						■						
		4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT												
		5 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT								■				
10	BATAM	1 MOU	■											
		2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan												
		3 Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)		■										
		4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT												
		5 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT							■					
II (Dalam Proses MOU)														
1	SEMARANG	1 MOU				■								
		2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan												
		3 Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)						■						
		4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT												
		5 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT								■				
2	PONTIANAK	1 MOU				■								
		2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan												
		3 Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)							■					
		4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT												
		5 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT									■			
III (Belum MOU)														
1	DENPASAR	1 MOU				■								
		2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan												
		3 Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)							■					
		4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT												
		5 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT									■			
2	DEPOK	1 MOU				■								
		2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan												
		3 Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)							■					
		4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT												
		5 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT										■		
3	TANGERANG	1 MOU				■								
		2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan												
		3 Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)							■					
		4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT												
		5 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT										■		

**ROAD MAP LALU LINTAS PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014**

No	Nama Kegiatan	Lokasi Penerapan Setiap Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penetapan aturan perintah dan larangan di jalan nasional di kawasan perkotaan	v	v	v	v	v	v	v
2	Penyediaan fasilitas lalu lintas (rambu, marka APILL) di Jalan nasional pada kawasan perkotaan	v	v	v	v	v	v	v
3	Penanganan titik-titik kemacetan di jalan nasional pada kawasan perkotaan: Pemasangan pagar pemisah; Separator.	v	v	v	v	v	v	v

**ROAD MAP LALU LINTAS PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014**

Program Penyempurnaan Peraturan Dibidang Lalu Lintas Perkotaan

No	Nama Kegiatan	Jadwal Penyusunan						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Penyusunan peraturan dalam rangka revisi RUU LLAJ							
	a) RPP Prasarana dan Lalu Lintas	V						
	b) RPermenhub : MRLL, Rambu, Marka, APILL,	V						
	c) RPerdirjen: Penyelenggaraan MRLL di Jalan nasional di kawasan perkotaan	V						
II.	Penyusunan peraturan pelaksanaan Permenhub Km 14/2006							
	a) Penyelenggaraan MRLL di jalan nasional.	V						
	b) Tata cara Penilaian tingkat pelayanan jalan dan persimpangan.	V						
	c) Tata cara/prosedur penetapan tingkat pelayanan di jalan nasional.		V					
	d) Toleransi batas kecepatan di jalan nasional.	V						
III.	Penyusunan pedoman pelaksana UU/PP Jalan							
	a) Pedoman Penyelenggaraan MRLL di jalan tol	V						
	b) Tata cara penilaian tingkat pelayanan jalan tol dalam kawasan perkotaan;		V					
	c) Pedoman penempatan fasilitas lalu lintas di jalan;		V					
	d) Pedoman pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan pekerjaan di jalan;		V					
	e) Penyelenggaraan parkir dibadan jalan		V					
	f) Pedoman Penentuan Desain Ramp (Exit/Entry) jalan Tol		V					

ROAD MAP LALU LINTAS PERKOTAAN TAHUN 2008 - 2014

Program Pengembalian Fungsi Jaringan Jalan (Reutilisasi)

No	Nama Kegiatan	Lokasi Penerapan Setiap Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Reutilisasi Jalan & Persimpangan							
A.	Penanganan Persimpangan							
1.	Pengendalian persimpangan							
	Penerapan APILL Tenaga Surya	Kota-kota di jalur trans sumatera	Kota-kota di jalur trans kalimantan	Kota-kota di jalur trans sulawesi	Kota-kota di jalan nasional di NTT/NTB	Pemenang WTN 2011	Pemenang WTN 2012	Pemenang WTN 2013
2.	Perbaikan Geometri Persimpangan	Kota-kota di jalur pantura	Kota-kota di jalur trans sumatera	Kota-kota di jalur trans kalimantan	Kota-kota di jalur trans sulawesi	Kota-kota di jalan nasional di NTT/NTB	Pemenang WTN 2012	Pemenang WTN 2013
3.	Penerapan ATCS	<ul style="list-style-type: none"> • Kota-kota jalur pantura • Kota Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota-kota jalur pantura • Balikpapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Makassar 	<ul style="list-style-type: none"> • Semarang 	Medan	Palembang	Padang
B.	Penanganan Ruas							
1.	Pengendalian Akses Jalan	Kota-kota di jalur pantura	Kota-kota di jalur trans sumatera	Kota-kota di jalur trans kalimantan	Kota-kota di jalur trans sulawesi	Kota-kota di jalan nasional di NTT/NTB	Pemenang WTN 2012	Pemenang WTN 2013
2.	Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Tinggi • Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • Binjai • Tomohon 	<ul style="list-style-type: none"> • Bandar Lampung • Samarinda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pontianak • Sorong 	Pemenang WTN 2011	Pemenang WTN 2012	Pemenang WTN 2013
II.	Optimalisasi Pemanfaatan Jalan							
1.	Pembatasan lalu lintas	Surabaya	Bandung	Makassar	Medan	Semarang	Yogyakarta	Palembang
2.	Penerapan skema TDM lainnya	Bogor	Pemenang WTN 2008	Pemenang WTN 2009	Pemenang WTN 2010	Pemenang WTN 2011	Pemenang WTN 2012	Pemenang WTN 2013

ROAD MAP DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN TAHUN 2008 - 2014

No.	Uraian Program/ Sub Program	RPJM (2007-2009)	Jangka Pendek (2010-2014)
1.	Pembangunan Standar, Norma, Pedoman Teknis, Panduan Praktis	<p>a. Pengumpulan literatur sebagai bahan pendukung pembangunan Standar, Norma dan Pedoman Teknis transportasi berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> <p>b. Pembuatan studi-studi perencanaan teknis transportasi berwawasan lingkungan & penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> <p>c. Pembuatan Standar, Norma dan Pedoman Teknis transportasi berwawasan lingkungan & penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> <p>d. Revisi / Perbaikan Standar, Norma dan Pedoman Teknis transportasi berwawasan lingkungan & penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> <p>1. Revisi SK Dirjen Hubdat No. 852/AJ. 302/ DRJD/2004 tentang Pemakaian BBG Pada Kendaraan Bermotor (finalisasi di Ditjen Hubdat (2007)</p> <p>2. Pembuatan KM dan KD Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk LPG/LGV (2008/2009)</p> <p>3. KD Analisis Dampak Lalu Lintas (2007/2008)</p> <p>4. Pedoman Trip Rate di berbagai jenis guna lahan (2009/2010)</p>	<p>1. Pedoman tata cara berlalu lintas di kawasan permukiman / lingkungan (2010/2011)</p> <p>2. Pedoman teknis fasilitas transportasi non-kendaraan bermotor (2012/2013)</p> <p>3. Pedoman Pedoman/tata cara evaluasi tingkat kebisingan dan getaran akibat lalu lintas (2014/2015)</p>
2a.	Pemberian bimbingan teknis tentang penyelenggaraan transportasi berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	<p>a. Penyuluhan dampak transportasi di wilayah perkotaan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Seminar, Workshop, Talkshow, dll - Penyebaran informasi melalui leaflet, booklet, dll di wilayah perkotaan. <p>Target: Tiap tahun di 5 kota di 5 Propinsi</p> <p>1. Kota Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta Semarang, Surabaya (2007)</p> <p>2. Kota Padang, Balikpapan, Batam, Banten, Manado (2008)</p> <p>3. Bandar Lampung, Kendari, Palangkaraya, Mataram dan Pontianak (2009)</p>	<p>Target: Tiap tahun di 5 kota di 5 Propinsi terpilih.</p> <p>1. Di 5 Kota besar (2010)</p> <p>2. Di 5 Kota besar (2011)</p> <p>3. Di 5 Kota besar dan sedang (2012)</p> <p>4. Di 5 Kota besar dan sedang (2013)</p> <p>5. Di 5 Kota besar dan sedang (2014)</p>
2b.	Pemberian bimbingan teknis tentang penyelenggaraan transportasi berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	<p>b. Bantuan teknis pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan di perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi bantuan Pem. Pusat 50% s.d. 100% <p>Bantuan teknis untuk 4 Kota (Kota Metropolitan dan Besar)</p> <p>1. Jambi dan Yogyakarta (2008)</p> <p>2. Purwokerto dan Denpasar (2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi bantuan Pem. Pusat 50% s.d. 100% <p>Bantuan Teknis untuk Kota</p> <p>1. Makassar dan Surabaya (2010)</p> <p>2. Malang dan Mataram (2011)</p> <p>3. Medan dan Banda Aceh (2012)</p> <p>4. Palembang dan Bandar Lampung (2013)</p> <p>5. Bandung dan Padang (2014)</p>

ROAD MAP DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN TAHUN 2008 - 2014

2c.	Kota Percontohan di Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi / detail design engineering (Tahun 2008) 2. Program angkutan umum massal (Tahun 2009) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATCS (Tahun 2010) 2. Trotoar (Tahun 2011) 3. Taman lalu lintas (Tahun 2012) 4. Kawasan transportasi ramah lingkungan (Tahun 2013) 5. Kawasan transportasi ramah lingkungan (Tahun 2014)
3	Master Plan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Master Plan Transportasi Ramah Lingkungan b. Tersedianya Master Plan Pemanfaatan BBG (CNG dan LGV) c. Tersedianya Master Plan Pemanfaatan BBN d. Terealisasinya penghapusan kandungan Pb (timbal) dalam premium e. Terealisasinya implementasi standar EURO 2 	<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Master Plan b. Monitoring dan Evaluasi Master Plan b. Monitoring dan Evaluasi Master Plan d. Monitoring Kualitas Bahan Bakar e. Terealisasinya implementasi standar EURO 4 dan EURO 5
4.	Pelaksanaan analisis, evaluasi & pelaporan, penanganan dampak transportasi dan pemberian rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan penanganan dampak lalu lintas akibat pemb. pusat-pusat kegiatan pada jalan Nasional di kawasan perkotaan <ul style="list-style-type: none"> - Kota Metropolitan dan Kota Besar 1. Denpasar (2007) 2. Yogyakarta (2008) 3. Banjarmasin dan Samarinda (2009) b. Penyusunan <i>data base</i> transportasi ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Metro, Besar dan kota Sedang 1. Palembang dan Bandar Lampung (2010) 2. Kota Bandung dan Semarang (2011) 3. Mataram dan Kupang (2012) 4. Pekanbaru dan Batam (2013) 5. Palangkaraya dan Pontianak (2014)
5.	Diversifikasi Energi Bidang Transportasi Darat Sub Program BBG	<ol style="list-style-type: none"> a. Investasi untuk pembangunan jaringan SPBG di DKI Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Cirebon, dan Batam b. Penerapan BBG pada seluruh armada taksi dan angkutan umum di kota yang memiliki jaringan distribusi BBG <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan investasi Converter Kit untuk taksi dan angkutan umum = 20.000 unit 1. DKI Jakarta (Tahun 2007) Perda Prov. DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 2. Jabodetabek, Surabaya, Medan, (Tahun 2008) 3. Jabodetabek, Surabaya, Medan, Palembang (Tahun 2009) - Kebutuhan investasi Converter Kit untuk kendaraan dinas Pemerintah c. Sosialisasi tentang pemanfaatan BBG untuk kendaraan bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perluasan jaringan SPBG di kota-kota besar di Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan b. Penerapan BBG pada seluruh armada taksi dan angkutan umum di kota metropolitan, besar dan sedang <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan investasi Converter Kit untuk taksi dan angkutan umum = 30.000 unit 1. Surabaya, Medan, Palembang (Tahun 2010) 2. Medan, Palembang, Batam (Tahun 2011) 3. Batam, Cirebon, Denpasar (Tahun 2012) 4. Batam, Cirebon, Denpasar (Tahun 2013) 5. Denpasar, Cirebon, Cikampek (Tahun 2014) - Kebutuhan investasi Converter Kit untuk kendaraan dinas Pemerintah

**ROAD MAP DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014**

6.	Diversifikasi Energi Bidang Transportasi Darat	
Sub Program Bio Fuel dan listrik	a. Penetapan peraturan tentang pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) pada kendaraan bermotor	a. Penetapan peraturan tentang pemanfaatan energi listrik pada kendaraan bermotor
	b. Substitusi biofuel pada kendaraan dinas pemerintah dan angkutan umum (Taksi, Bus Besar, Bus Sedang, Bus Kecil) sebesar 2 - 5%	b. Substitusi biofuel pada kendaraan dinas pemerintah dan angk. umum (Taksi, Bus Besar, Bus Sedang, Bus Kecil) sebesar 5 - 10%
	c. Kebijakan harga biofuel	c. Evaluasi/revisi kebijakan dan harga biofuel
	d. Sosialisasi tentang penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif untuk kendaraan bermotor	
	e. Program Aksi / penerapan pemanfaatan biofuel untuk kendaraan Pemerintah dan angkutan umum	e. Program Aksi / penerapan pemanfaatan biofuel untuk kendaraan angkutan umum dan pribadi